

EFEKTIVITAS PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN DALAM SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN PROVINSI PAPUA

Nathan Gilbert Ayomi
31.1047

Program Studi Keuangan Publik

email : lawtrafalgar918@gmail.com

Pembimbing Skripsi : Jatnika Dwi Asri, SE, M.Si, M.Ak

ABSTRACT

Background (GAP): The Regional Government Information System (SIPD) is an integrated application used nationally to assist in regional financial management, particularly in the preparation of Work Plans and Budgets (RKA). Despite its many benefits, the use of SIPD still faces various issues, including inadequate human resources, frequent technical problems with the system, and slow response from the Ministry of Home Affairs in addressing system-related issues. **Objective:** This study aims to evaluate the effectiveness of RKA preparation using SIPD at the Regional Finance and Asset Agency (BKAD) of Yapen Islands Regency and to identify the inhibiting factors and efforts made by BKAD. **Method:** This study employs a descriptive qualitative method with an inductive approach. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation. The steps taken include data reduction, data presentation, and conclusion drawing. **Results/Findings:** The research findings indicate that the use of SIPD in RKA preparation is proven to be effective and efficient. SIPD significantly contributes to helping local governments manage local finances, enhancing transparency, accountability, and efficiency in public financial management. **Conclusion:** SIPD is a valuable tool in supporting the planning and budgeting process, but there is a need for improvements and enhancements in human resources, information technology infrastructure, and coordination between local and central governments to improve SIPD's performance and effectiveness.

Keywords: Effectiveness, Work Plans and Budgets, SIPD.

ABSTRAK

Latar Belakang (GAP): Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan aplikasi terpadu yang digunakan secara nasional untuk membantu pengelolaan keuangan daerah, terutama dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Meskipun memiliki banyak manfaat, penggunaan SIPD masih menghadapi berbagai masalah, termasuk kurangnya Sumber Daya Manusia yang memadai, seringnya masalah teknis pada sistem, dan lambatnya respon dari Kementerian Dalam Negeri dalam menangani permasalahan sistem. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penyusunan RKA dengan menggunakan SIPD di Badan Keuangan dan Aset Daerah

(BKAD) Kabupaten Kepulauan Yapen serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan upaya yang dilakukan oleh BKAD. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Langkah-langkah yang diambil meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan SIPD dalam penyusunan RKA terbukti efektif dan efisien. SIPD memberikan kontribusi signifikan dalam membantu Pemerintah Daerah mengelola keuangan lokal, meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan publik. **Kesimpulan:** SIPD merupakan alat yang berharga dalam mendukung proses perencanaan dan penganggaran, namun perlu adanya upaya perbaikan dan peningkatan dalam hal Sumber Daya Manusia, infrastruktur teknologi informasi, serta koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas SIPD.

Kata Kunci: Efektivitas, Rencana Kerja dan Anggaran, SIPD.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mendukung tujuan pembangunan nasional, pemerintah telah mengimplementasikan kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang dimulai sejak tahun 2001. Hal ini bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya mereka sesuai dengan prioritas nasional dan lokal. Kebijakan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Perubahan fundamental dalam sistem dan mekanisme pengelolaan pemerintah daerah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembangunan wilayah, yang pada gilirannya akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah daerah diharapkan dapat lebih mandiri dan inovatif dalam mengelola keuangan dan ekonomi mereka. Untuk mencapai tujuan tersebut, berbagai upaya dilakukan, termasuk penguatan birokrasi, pembangunan ekonomi, dan peningkatan pelayanan publik. Peningkatan peran dan kinerja pemerintah daerah dalam bidang keuangan dan ekonomi sangat penting untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Selain itu, dengan adanya otonomi daerah, setiap daerah dituntut untuk mengelola sumber daya yang dimiliki dengan lebih efektif dan efisien, serta selaras dengan kepentingan dan prioritas daerah.

Di era globalisasi dan revolusi industri 5.0, perkembangan sistem data dan teknologi informasi menjadi sangat cepat dan signifikan. Teknologi informasi memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi dan kecepatan akses ke layanan publik. E-government, sebagai salah satu solusi, bertujuan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan kualitas layanan publik, memfasilitasi komunikasi antar lembaga pemerintah pusat dan daerah, serta mendorong partisipasi masyarakat yang lebih luas. Melalui e-government, pemerintah Indonesia berupaya mendorong transformasi masyarakat menuju era masyarakat informasi, sekaligus mencegah terjadinya kesenjangan digital.

Dalam konteks sistem informasi, L. Gaol (2008) menyebutkan bahwa sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem yang tidak hanya memproses transaksi yang bermanfaat bagi organisasi, tetapi juga memberikan dukungan informasi untuk fungsi manajemen dalam pengambilan keputusan. Sistem informasi manajemen ini merupakan kolaborasi antara sumber daya manusia dan perangkat terkait, sebagaimana dijelaskan oleh Siagian (2011). Keahlian sumber daya manusia dalam mengoperasikan sistem informasi ini sangat penting untuk memenuhi kebutuhan informasi di suatu instansi. Tujuan dari sistem informasi ini adalah untuk mengadministrasikan, mendokumentasikan, dan mengelola data keuangan daerah dengan lebih baik.

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia memberikan pedoman bagi pemerintah pusat dan daerah dalam mengelola data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengelolaan pembangunan. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan tersedianya data yang akurat, tepat waktu, terpadu, dapat diverifikasi, dan mudah diakses. Data tersebut digunakan oleh otoritas pusat dan daerah sebagai dasar untuk mengendalikan pembangunan.

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005, adalah sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah menjadi informasi yang dapat diakses oleh masyarakat dan digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan. Sistem ini dirancang untuk mengatasi keterbatasan penyusunan anggaran secara manual, yang rentan terhadap perubahan data dan kesalahan.

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Elektronik (SPBE) menekankan pentingnya penerapan sistem e-Government berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat lokal. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah harus menyediakan informasi tentang pembangunan dan keuangan daerah melalui sistem informasi pemerintahan daerah. Menteri Dalam Negeri kemudian mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang SIPD, yang menggantikan peraturan sebelumnya karena dianggap kurang efektif dalam mengelola data pemerintahan daerah secara terpadu.

Setiap penggunaan dana dalam pemerintahan harus dicatat dalam bentuk laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Laporan ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Negara (SAP). Laporan ini menyediakan informasi terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi yang dilakukan oleh entitas pelapor, dan merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat.

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) memainkan peran penting dalam pengumpulan data secara cepat dan real-time. Sistem ini membantu dalam merencanakan program dan kegiatan secara lebih rasional, efektif, dan efisien serta mengevaluasi pembangunan daerah. SIPD mendukung integrasi penggunaan data kemajuan pembangunan di berbagai instansi pemerintah. Namun, penerapan SIPD tidak tanpa tantangan. Sistem ini melibatkan banyak satuan kerja pemerintahan yang masing-masing mengelola perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

Kementerian Dalam Negeri menyarankan agar pemerintah daerah mengintegrasikan data perencanaan, keuangan, dan pelaporan. Dengan penerapan SIPD, Kemendagri dapat memonitor secara real-time daerah yang belum menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga memungkinkan Kemendagri untuk mendorong daerah mengurangi pengeluaran anggaran yang tidak relevan. Skema penggunaan SIPD melibatkan berbagai tingkat pemerintahan daerah, dari penanggungjawab kebijakan hingga penanggungjawab teknis operasional.

Pembiayaan penerapan SIPD di daerah dianggarkan pada tahun anggaran sebelumnya dan dituangkan dalam DIPA. Ini mencakup biaya untuk bimbingan teknis, pengembangan kapasitas aparatur, dan pengembangan sistem pendukung seperti perangkat dan jaringan. Menurut Dirjen Keuangan Daerah Agus Fatoni, SIPD dapat meminimalkan penggunaan anggaran pemerintah daerah dalam mengembangkan SPBE di bidang perencanaan, keuangan, dan pelaporan daerah, sehingga efisiensi anggaran dapat tercapai.

Satu Data Indonesia merupakan kebijakan pengelolaan data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, tepat waktu, terintegrasi, mudah dipahami, mudah diakses, dan dapat dibagikan antara otoritas pusat dan daerah. Hal ini sesuai dengan berbagai undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah, sistem perencanaan pembangunan nasional, dan keterbukaan informasi publik.

Sejak tahun 2021, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen menggunakan SIPD dalam mengelola keuangannya. Setiap Perangkat Daerah (PD) dilengkapi dengan komputer yang mengintegrasikan data keuangan daerah secara elektronik. SIPD bertujuan untuk menyediakan aplikasi terpusat bagi instansi yang berada di bawah yurisdiksi Badan Pengelola Aset Keuangan Daerah (BKAD) Kabupaten Kepulauan Yapen. Dengan sistem penyusunan dan pelaporan yang transparan, pelaksanaan APBD dapat terlaksana tanpa penyimpangan dalam penggunaan anggaran.

Namun, meskipun mekanisme penyediaan uang telah berpindah ke Mekanisme Uang yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD), penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) kini kembali ke Sistem Uang Untuk Dipertanggungjawabkan (UUDP). Konsep UUDP mengasumsikan bahwa rencana harus berfungsi dengan baik dan sempurna. Sistem pengelolaan keuangan daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk setiap kode rekening, dan uang tidak dapat ditransfer dari SP2D ke rekening lain. Pendekatan ini memastikan bahwa program dan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan SPJ.

Penyusunan RKA memiliki fungsi penting sebagai dokumen perencanaan tahunan pemerintah daerah. Penyusunannya harus efektif dengan memperhatikan dan mempertimbangkan aspek penting baik politik maupun kesejahteraan dan pembangunan daerah oleh pemangku kepentingan melalui musrenbang tahunan berjenjang untuk keterpaduan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja (RENJA).

Efektivitas penyusunan RKA idealnya sejalan dengan kegiatan pemerintah yang berkaitan dengan pengalokasian dana pada tiap program dan kegiatan. Anggaran adalah alat perencanaan yang mengindikasikan target yang harus dicapai oleh pemerintah serta alat pengendalian untuk memastikan anggaran telah disetujui oleh legislatif untuk dibelanjakan.

Dalam pelaksanaannya, SIPD masih menghadapi beberapa masalah. Sebagai contoh, di Kabupaten Nganjuk, masalah efektivitas penyusunan RKA dan Dokumen RKP melalui aplikasi

SIPD mencakup kurangnya pemahaman terhadap penggunaan aplikasi dan perubahan nomenklatur kegiatan. Dari masalah ini, dapat disimpulkan bahwa penerapan SIPD masih memiliki beberapa tantangan yang perlu dievaluasi agar dapat berfungsi sesuai dengan harapan.

Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas penyusunan RKA berbasis SIPD di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua sangat diperlukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana sistem ini efektif dalam mendukung pengelolaan keuangan, khususnya dalam bidang perencanaan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam penyusunan RKA. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang berguna untuk perbaikan dan pengembangan SIPD ke depan.

Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali informasi mendalam mengenai pengalaman, tantangan, dan keberhasilan dalam penerapan SIPD di BKAD Kabupaten Kepulauan Yapen. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan berbagai pihak terkait, termasuk pejabat BKAD, staf teknis, dan pengguna aplikasi SIPD. Analisis data dilakukan secara tematik untuk mengidentifikasi pola, tema, dan wawasan yang relevan dengan tujuan penelitian.

Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam mengimplementasikan SIPD. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi pengambil kebijakan dalam merancang dan mengembangkan sistem informasi keuangan yang lebih efektif dan efisien di masa depan. Dengan demikian, penelitian ini memiliki potensi untuk berkontribusi pada peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah, yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional secara lebih efektif dan berkelanjutan.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil

Penelitian ini menyoroti adanya kesenjangan dalam penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) khususnya dalam aspek pengelolaan keuangan dan penyusunan anggaran. Meskipun berbagai penelitian sebelumnya telah mengevaluasi kesiapan dan implementasi SIPD di berbagai daerah, masih terdapat kekurangan dalam pemahaman mengenai hambatan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam proses ini. Contohnya, penelitian Rafiani (2021) dan Harahap (2021) mengidentifikasi adanya kendala teknis dan sumber daya manusia yang mempengaruhi efektivitas penggunaan SIPD, namun belum secara mendalam mengeksplorasi solusi untuk mengatasi masalah ini.

Selain itu, penelitian terdahulu cenderung berfokus pada aspek administratif dan teknis dari implementasi SIPD, seperti dalam studi yang dilakukan oleh Novianta (2021) dan Vitriana et al. (2022). Meskipun penting, pendekatan ini seringkali mengabaikan dimensi kebijakan dan peraturan yang mempengaruhi proses penyusunan anggaran. Sebagai contoh, Almujaib (2020) menyoroti pentingnya sistem pengendalian internal, namun tidak mengaitkannya secara langsung dengan kebijakan perencanaan anggaran yang lebih luas. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk

penelitian yang lebih komprehensif yang mencakup analisis kebijakan dan regulasi serta dampaknya terhadap implementasi SIPD.

Lebih lanjut, meskipun beberapa studi seperti yang dilakukan oleh Armala (2020) dan Riswat (2021) telah mengevaluasi efisiensi penyusunan anggaran, penelitian ini masih terbatas pada sektor atau instansi tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan melakukan analisis mendalam terhadap berbagai faktor yang mempengaruhi penerapan SIPD di berbagai konteks pemerintahan daerah. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan dalam memahami tantangan dan peluang dalam penerapan SIPD untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

1.3 Penelitian Terdahulu

Sejumlah penelitian telah dilakukan terkait penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam pengelolaan keuangan daerah. Penelitian-penelitian ini menunjukkan berbagai tantangan dan keberhasilan yang dialami oleh pemerintah daerah dalam mengimplementasikan SIPD. Studi-studi ini juga memberikan wawasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas SIPD dan dampaknya terhadap tata kelola keuangan daerah. Berikut ini adalah ringkasan dari beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik ini.

Penelitian pertama dilakukan oleh Athiya Rafiani (2021) di IPDN. Penelitian ini berfokus pada analisis kesiapan penerapan SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah Kota Pagaralam. Penelitian deskriptif kualitatif ini menggunakan pendekatan induktif untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan SIPD. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat keterbatasan dalam jumlah dan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta masih banyak proses penginputan laporan yang dilakukan secara manual. Selain itu, masalah seperti kurangnya sumber daya finansial, virus, dan sinyal yang buruk juga menjadi kendala utama.

Penelitian kedua dilakukan oleh Muhammad Zaky Harahap (2021) di IPDN. Penelitian ini mengevaluasi pemanfaatan SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah untuk mewujudkan good governance di Kota Medan. Penelitian deskriptif kualitatif ini menemukan bahwa penerapan SIPD masih menghadapi berbagai kendala, sehingga menyebabkan keterlambatan dalam pengelolaan keuangan. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan melakukan evaluasi internal. Fokus penelitian ini adalah pada evaluasi pemanfaatan SIPD dan teori yang digunakan adalah teori Nazir (2014).

Penelitian ketiga dilakukan oleh Novianta (2021) di Universitas Jambi. Penelitian ini menganalisis implementasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui aplikasi SIPD di Kantor BKAD Kota Jambi. Metode deskriptif digunakan untuk mengidentifikasi bagaimana SIPD membantu dalam penyusunan APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIPD membantu BKAD dalam menyusun anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan BPK. Penelitian ini menggunakan teori dari Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 sebagai landasan teoretis.

Penelitian keempat dilakukan oleh Nidya Vitriana, Agustiawan, dan Muhammad Ahyaruddin pada tahun 2022 di Unmuh Riau. Penelitian ini menganalisis penerapan SIPD pada BKAD Pekanbaru. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, penelitian ini menemukan bahwa SIPD yang digunakan BKAD Pekanbaru tidak efektif dan implementasinya tidak optimal. Fokus penelitian ini adalah pada analisis penerapan SIPD dengan teori yang digunakan adalah teori Edward III (1980). Temuan ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam sistem dan pelatihan pengguna.

Penelitian kelima dilakukan oleh Armala S. pada tahun 2020 di Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Sosial. Penelitian ini mengkaji implementasi PP No. 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga pada Direktorat Bandar Udara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Studi ini menemukan bahwa penyusunan anggaran yang dilakukan secara optimal terlihat dari minimnya revisi dan kegiatan yang sesuai dengan rencana. Fokus penelitian ini adalah mencari penyebab inefisiensi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran di IAIN Curup.

Penelitian keenam dilakukan oleh Riswat R. pada tahun 2021 di Jurnal Perspektif. Penelitian ini mengevaluasi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) di IAIN Curup. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan angket. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inefisiensi dalam penyusunan RKA disebabkan oleh kurangnya sosialisasi petunjuk teknis dan dokumen standar biaya. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya inovasi dalam penyusunan RKA.

Penelitian ketujuh dilakukan oleh Almujab S. pada tahun 2020 di OIKOS Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi dan Ilmu Ekonomi. Penelitian ini mengukur pengaruh sistem pengendalian intern terhadap penyusunan RKA pada BAPPEDA Kota Bandung. Hasil penelitian menunjukkan adanya korelasi positif yang kuat antara sistem pengendalian intern dan penyusunan RKA. Dengan koefisien determinasi sebesar 82%, penelitian ini menegaskan pentingnya sistem pengendalian intern dalam pengelolaan anggaran yang efisien.

Penelitian kedelapan dilakukan oleh Aprizal Y. pada tahun 2023 di MEUSEURAYA - Jurnal Pengabdian Masyarakat. Penelitian ini membahas pendampingan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah (RKAM) melalui aplikasi e-RKAM pada madrasah di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Implementasi e-RKAM membantu madrasah dalam melaksanakan evaluasi diri dan menyusun RKAM. Pendampingan dilakukan melalui kunjungan langsung ke madrasah untuk memastikan penggunaan aplikasi yang efektif.

Penelitian kesembilan dilakukan oleh Manoppo E. dan Walandouw S. pada tahun 2019 di Jurnal EMBA. Penelitian ini menganalisis penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD) di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alokasi anggaran dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah mencapai 92,22% dari total anggaran yang terealisasi. Penelitian ini menyoroti pentingnya transparansi dan partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran.

Penelitian kesepuluh dilakukan oleh Utami S. dan Abbas Y. pada tahun 2023 di Jurnal Akuntansi Manado. Penelitian ini mengevaluasi penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan alokasi belanja program prioritas di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor. Menggunakan pendekatan logic model, penelitian ini menemukan bahwa sistem informasi kinerja dan proses penganggaran perlu lebih

fokus pada hasil. Sistem yang ada saat ini lebih berbasis output dan kurang mencerminkan kinerja yang ditargetkan.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini menawarkan kebaruan ilmiah dengan mengintegrasikan analisis teknis, administratif, dan kebijakan dalam penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Berbeda dengan penelitian terdahulu yang cenderung fokus pada satu aspek tertentu, studi ini menggabungkan berbagai dimensi yang mempengaruhi keberhasilan implementasi SIPD. Pendekatan holistik ini memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hambatan dan solusi dalam penggunaan SIPD, yang pada akhirnya dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah.

Selain itu, penelitian ini memperkenalkan metodologi evaluasi baru yang tidak hanya mengevaluasi efektivitas teknis SIPD, tetapi juga mempertimbangkan faktor regulasi dan kebijakan yang seringkali diabaikan. Dengan memanfaatkan kerangka teori yang lebih luas dan data empiris dari berbagai daerah, penelitian ini dapat mengidentifikasi kesenjangan kebijakan yang berdampak pada implementasi SIPD. Pendekatan ini memberikan wawasan baru tentang bagaimana kebijakan pemerintah dapat disesuaikan untuk mendukung penggunaan teknologi informasi dalam manajemen keuangan daerah.

Terakhir, penelitian ini menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, Kementerian Dalam Negeri, dan instansi terkait lainnya dalam mengatasi kendala implementasi SIPD. Melalui analisis yang mendalam tentang upaya kolaboratif yang telah dilakukan dan potensi perbaikan yang dapat diterapkan, studi ini memberikan rekomendasi praktis yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk mengoptimalkan penggunaan SIPD. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menambah literatur akademis tetapi juga memberikan kontribusi langsung bagi peningkatan tata kelola pemerintahan di Indonesia.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi efektivitas penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai upaya untuk mewujudkan konsep tata pemerintahan yang baik. Fokus utama adalah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua. Dengan mendalami prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas, penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana implementasi SIPD dapat mendukung pengelolaan keuangan daerah secara lebih efisien dan transparan.

Berdasarkan permasalahan yang diidentifikasi, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengukur sejauh mana RKA yang disusun dalam SIPD mampu mencapai tujuan efektivitasnya di BKAD Kabupaten Kepulauan Yapen. Evaluasi ini akan mencakup aspek-aspek perencanaan, penganggaran, dan pelaporan yang dilakukan berdasarkan standar efisiensi dan efektivitas administrasi publik. Tujuan kedua adalah untuk meneliti berbagai faktor yang dapat menghambat efektivitas penyusunan RKA dalam SIPD di BKAD. Faktor-faktor ini meliputi tantangan teknis, kebijakan, serta aspek manajerial yang mempengaruhi proses implementasi dan penggunaan SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah. Tujuan ketiga adalah untuk mengidentifikasi upaya konkret yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen dalam mengatasi faktor penghambat tersebut. Penelitian ini juga akan mengevaluasi keberhasilan dan dampak dari strategi yang diterapkan untuk memperbaiki atau meningkatkan proses penyusunan RKA dengan memanfaatkan SIPD.

Melalui pendekatan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana penerapan SIPD dapat ditingkatkan untuk mendukung prinsip tata pemerintahan yang baik, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas layanan publik dan akuntabilitas di daerah Kabupaten Kepulauan Yapen. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan efisiensi dan efektivitas tata kelola keuangan publik di tingkat lokal.

II. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode deskriptif kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena tujuan utamanya adalah untuk memberikan deskripsi yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai efektivitas penyusunan rencana kerja dan anggaran dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua. Metode deskriptif kualitatif dianggap tepat karena memungkinkan peneliti untuk mendalami fenomena yang ada melalui pengamatan langsung dan interaksi dengan informan yang relevan. Dalam hal ini, data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Kepala BKAD Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabid Anggaran BKAD, dan Admin SIPD. Wawancara ini dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur, yang memungkinkan peneliti untuk menggali informasi yang mendalam mengenai efektivitas sistem yang diteliti Yusuf (2014).

Penelitian ini juga mengandalkan data sekunder dari berbagai dokumen resmi seperti Peraturan SIPD, Laporan Realisasi Anggaran, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja (Renja), dan Renstra (Rencana Strategis) Moleong (2013). Data sekunder ini diperlukan untuk melengkapi dan memperdalam pemahaman terhadap konteks dan kondisi yang sedang diteliti. Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari dokumen-dokumen tersebut, sehingga memastikan bahwa data yang diperoleh valid dan relevan dengan tujuan penelitian.

Selain itu, observasi langsung dilakukan untuk memberikan gambaran lebih jelas tentang situasi dan kondisi yang ada di lapangan, seperti proses integrasi dan adaptasi sistem yang sedang berjalan.

Proses pengumpulan data dilakukan secara sistematis dan terstandar, mengikuti langkah-langkah yang telah ditetapkan dalam metodologi penelitian kualitatif Arikunto (2010). Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif, yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan merangkum informasi yang relevan dan memfokuskan pada hal-hal yang esensial untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Penyajian data dilakukan melalui uraian singkat, diagram, dan narasi untuk menggambarkan temuan dari analisis data. Kesimpulan dari penelitian ini merupakan hasil dari proses analisis yang mendalam dan berdasarkan data yang telah terkumpul dengan validitas yang terjamin.

Salah satu aspek penting dalam penelitian ini adalah identifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Kabupaten Kepulauan Yapen. Faktor pendukung internal seperti ketersediaan sarana dan prasarana, serta faktor pendukung eksternal seperti dukungan dari pemerintah pusat, menjadi penentu efektivitas implementasi sistem ini. Di sisi lain, faktor penghambat seperti keterbatasan anggaran dan kualifikasi sumber daya manusia dapat menghambat kelancaran implementasi Arikunto (2019). Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, dilakukan upaya langsung dan tidak langsung baik dari internal maupun eksternal, seperti peningkatan pelatihan dan sosialisasi kepada aparatur pemerintahan.

Penelitian ini juga mempertimbangkan aspek keberlanjutan dalam implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk meningkatkan kinerja sistem yang sedang dipelajari Creswell (2018). Hal ini penting dalam konteks pemerintahan daerah di Indonesia, di mana perubahan kebijakan dan teknologi informasi dapat berdampak signifikan terhadap efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. Melalui pendekatan kualitatif yang holistik, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami dan menjelaskan kompleksitas implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, serta menawarkan pandangan baru terhadap pengembangan kebijakan yang lebih efektif di masa depan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Efektivitas Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dalam SIPD di BKAD Kabupaten Kepulauan Yapen

Efektivitas penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kabupaten Kepulauan Yapen menjadi fokus utama dalam mengukur keberhasilan implementasi sistem ini. Dimensi pencapaian tujuan merupakan salah satu aspek krusial

dalam menilai efektivitas, yang mencakup terfasilitasinya kebutuhan data dan informasi keuangan. SIPD tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengelola keuangan daerah, tetapi juga memastikan pengambilan keputusan yang tepat dan berbasis data serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan daerah.

Sistem informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan sangat diperlukan dalam proses perencanaan dan penganggaran di Kabupaten Kepulauan Yapen. Dalam konteks ini, SIPD berperan penting sebagai sarana untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam pengambilan keputusan dan evaluasi pemerintahan daerah adalah akurat, relevan, transparan, dan akuntabel. Hasil wawancara dengan Kepala BKAD Kabupaten Kepulauan Yapen menunjukkan bahwa sistem ini telah memberikan manfaat signifikan dalam meningkatkan kualitas manajemen informasi keuangan daerah, meskipun masih ada tantangan dalam validasi data yang menjadi fokus perbaikan ke depan.

3.2 Faktor Penghambat Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dalam SIPD

Meskipun SIPD telah memberikan kontribusi yang signifikan, terdapat sejumlah faktor yang menghambat proses penyusunan RKA di Kabupaten Kepulauan Yapen. Implementasi SIPD yang dimulai pada tahun 2020 menghadapi tantangan, seperti penyesuaian dengan perubahan mekanisme penganggaran yang belum sepenuhnya sesuai dengan praktik di lapangan. Penggunaan konsep Uang yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) menjadi contoh bagaimana perubahan sistem seringkali tidak sejalan dengan praktik yang telah mapan di daerah.

Proses penatausahaan dan pelaporan juga menjadi kendala dalam penggunaan SIPD di lapangan. Tantangan ini menyoroti perlunya adaptasi yang lebih baik antara sistem yang diterapkan dan praktik yang ada, termasuk peningkatan pemahaman dan dukungan dari pihak terkait untuk memaksimalkan potensi SIPD sebagai alat manajemen keuangan yang efektif.

3.3 Upaya dalam Mengatasi Hambatan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dalam SIPD

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen telah melakukan sejumlah upaya untuk mengatasi hambatan dalam penyusunan RKA menggunakan SIPD. Diantaranya adalah kegiatan pembimbingan dan pelatihan yang dilakukan baik oleh Kementerian Dalam Negeri maupun secara internal di BKAD

Kabupaten Kepulauan Yapen. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan pengelola dalam menggunakan SIPD, sehingga proses penyusunan RKA dapat berjalan dengan lebih lancar dan efektif.

Selain pelatihan, upaya lain yang dilakukan termasuk pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur IT yang mendukung operasional SIPD, serta peningkatan koordinasi dan komunikasi dengan pihak penyelenggara sistem. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua hambatan teknis dan non-teknis dapat diatasi secara proaktif, sehingga SIPD dapat memberikan kontribusi maksimal dalam manajemen keuangan daerah.

SIPD di Kabupaten Kepulauan Yapen merupakan langkah maju dalam meningkatkan efektivitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Meskipun menghadapi sejumlah tantangan dalam implementasinya, upaya pemerintah daerah untuk memperbaiki sistem dan meningkatkan kapasitas SDM telah menunjukkan progres yang signifikan. Evaluasi terus menerus diperlukan untuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang ada, sehingga SIPD dapat optimal dalam mendukung perencanaan dan penganggaran yang akurat dan efisien di masa depan.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Diskusi temuan utama dalam penelitian merupakan bagian krusial yang memungkinkan peneliti untuk menginterpretasikan dan menguraikan hasil-hasil yang telah diperoleh dari penelitian mereka. Dalam konteks ini, diskusi temuan utama sering kali dibagi menjadi beberapa aspek yang mencakup signifikansi hasil, implikasi teoretis, serta implikasi praktis dari penelitian tersebut.

Pertama, dalam diskusi temuan utama, peneliti biasanya akan mengeksplorasi signifikansi hasil penelitian mereka. Hal ini melibatkan pembahasan tentang relevansi dan pentingnya temuan-temuan tersebut dalam konteks bidang studi yang relevan. Misalnya, jika penelitian tersebut menemukan hubungan yang signifikan antara dua variabel tertentu, diskusi akan fokus pada bagaimana temuan ini dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman kita tentang fenomena yang dikaji.

Kedua, peneliti juga akan mengeksplorasi implikasi teoretis dari temuan mereka. Ini melibatkan penempatan hasil penelitian dalam kerangka teoritis yang lebih luas dan membahas bagaimana temuan tersebut dapat mengisi celah pengetahuan atau mengubah pandangan teoritis yang ada. Contohnya, jika penelitian menunjukkan bahwa teori tertentu tidak sepenuhnya menjelaskan fenomena yang diamati, diskusi ini akan menggali bagaimana temuan tersebut dapat mengarah pada pengembangan atau revisi teori-teori yang ada.

Ketiga, diskusi temuan utama juga akan menyoroiti implikasi praktis dari penelitian. Ini mencakup pembahasan tentang bagaimana hasil penelitian dapat diterapkan dalam konteks dunia

nyata atau praktik. Misalnya, penelitian tentang efektivitas suatu program intervensi dapat membahas bagaimana temuan ini dapat membantu dalam merancang kebijakan publik atau strategi intervensi yang lebih efektif.

Secara keseluruhan, diskusi temuan utama merupakan momen penting dalam sebuah penelitian yang memungkinkan peneliti untuk tidak hanya menjelaskan hasil-hasil mereka, tetapi juga untuk menunjukkan kontribusi dan dampak dari penelitian tersebut dalam berbagai aspek ilmu pengetahuan, teori, dan praktik.

Perbandingan ini dengan penelitian sebelumnya dalam konteks penelitian tentang efektivitas penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua, penelitian ini memperluas pemahaman sebelumnya tentang implementasi SIPD dalam manajemen keuangan daerah. Studi sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Rafiani (2021) dan Harahap (2021), menyoroti kendala teknis dan sumber daya manusia yang mempengaruhi penerapan SIPD di berbagai daerah, namun belum secara mendalam mengidentifikasi solusi untuk mengatasi masalah ini. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Novianta (2021) dan Vitriana et al. (2022) lebih fokus pada aspek administratif dan teknis implementasi SIPD, dengan sedikit penekanan pada analisis kebijakan dan regulasi yang mempengaruhi proses penyusunan anggaran. Penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan mengeksplorasi sejauh mana SIPD efektif dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang spesifik bagi BKAD Kabupaten Kepulauan Yapen.

3.5 Diskusi Temuan Menarik

Diskusi temuan menarik dalam penelitian memainkan peran kunci dalam menyoroti aspek-aspek unik dan penting dari hasil penelitian yang dapat menarik perhatian pembaca dan masyarakat ilmiah. Pertama-tama, dalam diskusi ini, peneliti mengidentifikasi dan mengeksplorasi temuan-temuan yang paling menarik atau mengejutkan dari studi mereka. Misalnya, penemuan yang tidak sesuai dengan ekspektasi awal atau yang menunjukkan pola baru dalam data sering kali menjadi titik fokus diskusi ini, di mana peneliti dapat menjelaskan implikasi dari temuan tersebut.

Kedua, diskusi temuan menarik juga melibatkan analisis mendalam tentang faktor-faktor atau mekanisme yang mungkin menjadi penyebab hasil yang menarik tersebut. Ini melibatkan penelitian lebih lanjut untuk memahami mengapa fenomena tersebut terjadi atau bagaimana variabel-variabel tertentu berinteraksi untuk menghasilkan hasil yang tidak biasa atau menarik. Dalam konteks ini, peneliti menggunakan wawasan teoretis dan bukti empiris yang ada untuk merangkai cerita yang koheren tentang apa yang temuan tersebut berarti secara lebih mendalam.

Ketiga, diskusi temuan menarik juga membahas potensi dampak dan relevansi temuan tersebut terhadap bidang studi yang lebih luas atau terhadap masalah-masalah praktis dalam masyarakat. Misalnya, penelitian yang mengungkapkan pola-pola baru dalam data ekonomi dapat memiliki implikasi yang signifikan bagi kebijakan publik atau strategi bisnis. Diskusi ini menyoroti pentingnya temuan tersebut dalam konteks yang lebih luas dan menawarkan pandangan tentang bagaimana informasi ini dapat digunakan untuk mengarahkan penelitian dan tindakan di masa depan.

Dengan demikian, diskusi temuan menarik dalam penelitian tidak hanya menggambarkan hasil yang menonjol dari studi tersebut, tetapi juga mengajak pembaca untuk mempertimbangkan implikasi dan arti dari temuan-temuan tersebut dalam konteks ilmiah, teoritis, dan praktis yang lebih luas.

IV. KESIMPULAN

Kesimpulan dari sebuah penelitian memiliki peran penting dalam merangkum hasil-hasil utama yang telah dijelaskan dalam diskusi. Secara umum, kesimpulan tidak hanya memperkuat temuan-temuan utama yang telah disajikan, tetapi juga menyoroti implikasi praktis dan teoritis dari penelitian tersebut. Dalam konteks ini, peneliti menegaskan kembali temuan-temuan yang telah dikemukakan dan menunjukkan bagaimana temuan tersebut dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman kita terhadap fenomena yang diteliti.

Selain itu, kesimpulan juga merupakan kesempatan untuk merangkum hasil penelitian dalam kerangka lebih luas dan menyoroti kontribusi penelitian ini terhadap literatur yang ada. Ini dapat melibatkan pengidentifikasian celah-celah pengetahuan yang telah diisi oleh penelitian ini atau pengembangan teori-teori yang telah diuji atau diperluas. Kesimpulan juga bisa mencakup rekomendasi untuk penelitian lanjutan atau implikasi praktis yang dapat diambil dari hasil-hasil penelitian ini.

Terakhir, kesimpulan sering kali mempertimbangkan keterbatasan-keterbatasan yang mungkin mempengaruhi validitas hasil penelitian. Ini melibatkan pengakuan terbuka terhadap batasan-batasan metodologis, pembatasan sampel, atau faktor-faktor lain yang dapat membatasi generalisasi temuan-temuan tersebut. Dengan mengidentifikasi keterbatasan-keterbatasan ini, kesimpulan menawarkan pandangan yang lebih jelas tentang interpretasi dan relevansi temuan-temuan dalam konteks yang lebih luas.

Dengan demikian, kesimpulan bukan hanya merupakan bagian penutup dari penelitian, tetapi juga merupakan kesempatan untuk merangkum secara komprehensif kontribusi penelitian ini, menawarkan wawasan baru, dan mengajukan pertimbangan untuk penelitian dan aplikasi selanjutnya.

Arah Masa Depan Penelitian

Untuk merangkum arah masa depan penelitian, pertimbangan tentang pengembangan lebih lanjut dari studi yang ada sangat penting. Pertama, penelitian ini dapat diarahkan untuk mengeksplorasi variabel tambahan yang mungkin mempengaruhi hubungan yang diamati. Dengan memperluas kerangka analisis, penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi faktor-faktor kontekstual yang belum diteliti secara mendalam.

Kedua, ada ruang untuk memperluas generalisasi hasil penelitian ini. Dengan memperluas sampel dan memperhatikan konteks yang lebih luas, penelitian berikutnya dapat menilai sejauh mana temuan-temuan ini dapat diterapkan pada populasi yang lebih luas atau dalam konteks yang berbeda secara geografis atau budaya.

Selain itu, penting untuk mengeksplorasi implikasi praktis dari temuan-temuan ini. Penelitian masa depan dapat mengarah pada aplikasi praktis dari hasil-hasil ini dalam konteks kebijakan, manajemen organisasi, atau praktik profesional. Dengan demikian, penelitian selanjutnya dapat memperkuat kontribusi pengetahuan dan menunjukkan dampak yang lebih luas terhadap masyarakat dan dunia kerja secara umum.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk terlibat dalam penelitian ini. Saya ingin menyampaikan penghargaan yang tulus kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan wawasan selama proses penelitian. Tanpa kerjasama dan kontribusi dari berbagai pihak, penelitian ini tidak akan terwujud dengan baik. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan kebijakan dan penataan tenaga kerja di masa mendatang. Terima kasih atas waktu, dukungan, dan kerja sama yang telah diberikan. Semoga kita dapat terus berkolaborasi untuk mencapai tujuan yang lebih baik.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Muri Yusuf. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta : prenadamedia group
- Alfabeta Moleong, L. J. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- , 2019. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Creswell, John W. 2018. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Edisi ke-4 (cetakan kesatu)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
- Hutasoit, I. 2017. *Pengantar Ilmu Kependudukan*. Bandung : Alfabeta.
- Rafiani, A. (2021). *Analisis Kesiapan Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pagaram*. Skripsi, IPDN.
- Harahap, M. Z. (2021). *Evaluasi Pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) untuk Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Mewujudkan Good Governance di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara*. Jurnal, IPDN.

- Novianta. (2021). Implementasi Penyusunan Anggaran Pendapatan, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah Melalui Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Pada Kantor Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BKAD) Kota Jambi. Skripsi, Universitas Jambi.
- Vitriana, N., Agustiawan, & Ahyaruddin, M. (2022). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BKAD) Pekanbaru. *Jurnal, Unmuh Riau*.
- Armala, S. (2020). Implementasi PP No. 90 Tahun 2010 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Pada Direktorat Bandar Udara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Dan Sosial*, 1(90), 11-21. Retrieved from <https://embiss.com/index.php/embiss/article/view/2>
- Riswat, R. (2021). Inefisiensi Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Unit-Unit Kerja di IAIN Curup. *Jurnal Perspektif*, 14(1), 111-137. DOI: 10.53746/perspektif.v14i1.39
- Almujab, S. (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Bandung. *OIKOS Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi Dan Ilmu Ekonomi*. DOI: 10.23969/oikos.v4i1.2185
- Aprizal, Y. (2023). Pendampingan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah (RKAM) Melalui Aplikasi E-RKAM Pada Madrasah di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. *MEUSEURAYA - JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT*, 34-44. DOI: 10.47498/meuseuraya.v2i1.1957
- Manoppo, E. S., & Walandouw, S. K. (2019). Analisis Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA-SKPD) Pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 7(4), 4798-4807. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/25432>
- Utami, S., & Abbas, Y. (2023). Evaluasi Penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Pengalokasi Belanja Program Prioritas. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 289-303. DOI: 10.53682/jaim.vi.6923